

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sakinah Nurul Khaerati B
NPP. 29.1422

*Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: khaeratiiskn@gmail.com

ABSTRACT

*The author focuses the low revenue of the Wajo Regency has resulted in the regional government being very dependent on transfer funds from the central government. **Purpose:** This study aims to determine the level of regional financial capacity of Wajo Regency in supporting the implementation of regional autonomy during the 5-year budget period. **Methods:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. Data analysis using data reduction analysis methods, data presentation, data description through financial ratio analysis and drawing conclusions. **Result/Findings:** The results show that the level of regional financial capacity of Wajo Regency is still low, especially during the 5-year budget period, namely from 2016-2020 with an average degree of fiscal decentralization ratio of 8%, the ratio of the degree of regional financial dependence 70%, the ratio of financial independence 11.9%, however in terms of effectiveness of PAD management, it has shown good results with a rate of 103.3%. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, a strategic effort from the Regional Government is Exploring regional potentials that can be utilized as a source of new PAD to be used as objects and subjects of regional taxes and levies. Then the development of new innovations in increasing PAD through the application of online-based information technology as a means of supporting data collection, determination and collection of PAD.*

Keywords: *Analysis Capacity, Regional Finance, Regional Autonomy, PAD*

ABSTRAK

Rendahnya pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo mengakibatkan pemerintah daerah sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah selama 5 tahun periode anggaran yang dilihat dari analisis rasio keuangan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Laporan

Realisasi APBD Kabupaten Wajo sebagai data sekunder dan hasil wawancara dari Pejabat BPKPD Kabupaten Wajo sebagai data primer. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan dan penarikan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo masih rendah khususnya selama 5 tahun periode anggaran yaitu dari tahun 2016- 2020 dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 8%, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 70%, rasio kemandirian keuangan 11,9%, namun dalam hal efektivitas pengelolaan PAD sudah menunjukkan hasil yang baik dengan angka 103,3%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperlukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD baru untuk dijadikan objek maupun subjek dari pajak dan retribusi daerah. Kemudian pengembangan inovasi baru dalam meningkatkan PAD melalui penerapan teknologi informasi berbasis *online* sebagai sarana pendukung bagi pendataan, penetapan dan pemungutan PAD.

Kata Kunci: Analisis Kemampuan, Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, PAD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi, pada penyelenggaraan pemerintahannya memberikan keleluasaan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pemerintah memiliki peran penting untuk mengatur berlangsungnya kehidupan bernegara yang dapat mewujudkan tujuan utama negara, yakni memajukan kesejahteraan umum maka dibentuklah sejumlah daerah otonom. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, kebijakan pembentukan daerah otonom yang kemudian dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia bergeser menjadi desentralisasi. Pergeseran yang terjadi tentu saja juga ikut menyebabkan desentralisasi fiskal terkait wewenang pemerintah pusat yaitu otonomi daerah. Perundang-undangan itu kemudian mempertegas otoritas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri serta menetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pelaku otonomi daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga timbul tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih dominan berasal dari sumber-sumber pada daerahnya sendiri. Hal ini tersebut tentunya didukung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Wajo merancang visi dan misi yang harus diwujudkan untuk membangun dan mamajukan kabupaten tersebut. Dalam perwujudannya pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pendapatan asli daerah dan Pendapatan transfer merupakan komponen dalam APBD yang dapat digunakan sebagai indikator menentukan kemampuan keuangan daerah. Berikut adalah tabel kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Kabupaten Wajo:

Tabel 1.1
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap
Total Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi Pendapatan Transfer
2016	1.481.360.598	1.078.839.765	72%
2017	1.462.729.340	1.157.562.043	79%
2018	1.472.901.264	1.096.482.850	74%
2019	1.599.118.927	1.146.228.487	71%
2020	1.574.565.784	1.149.306.729	72%

Sumber: Diolah oleh penulis dari www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2016 sampai pada tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan secara bertahap dan terus menerus pada total pendapatan daerah Kabupaten Wajo, namun kontribusi pendapatan transfer sangat besar apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah ataupun pendapatan daerah lainnya. Menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Wajo terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dilihat bahwa kontribusi dana transfer masih sangat besar dari anggaran dalam 5 (lima) tahun anggaran APBD Kabupaten Wajo. Jika dipersentasekan, maka besar kontribusi pendapatan transfer berada pada angka 70% ke atas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo melalui via telepon pada tanggal 8 September 2021 beliau mengatakan bahwa permasalahan dapat terjadi dikarenakan belum optimalnya penggalian potensi daerah yang ada dan belum maksimalnya kemampuan sumber daya aparatur dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Wajo terhadap pendapatan transfer dari pihak eksternal, dalam hal ini dana dari pemerintah pusat.

Pada penyelenggaraan otonomi daerah, permasalahan seperti kontribusi PAD yang rendah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. Jika tidak

ditindaklanjuti maka suatu hari pemerintah daerah Kabupaten Wajo akan dianggap gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga diperlukan usaha dalam meningkatkan PAD dengan tujuan akhir meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo. Selain itu, sangat perlu dilakukan suatu analisis terhadap kemampuan keuangan untuk melihat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kemampuan keuangan daerah maupun analisis rasio keuangan daerah. Penelitian Gebriany Wenur berjudul Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung (Gebriany Wenur, 2013), menemukan bahwa PAD Kota Bitung lebih kecil dibanding belanja daerahnya. Sehingga perlu peningkatan PAD dengan upaya intensifikasi, karena kontribusi Pajak/Retribusi daerah dominan dalam PAD nya. Penelitian Jovan Febriantoko berjudul Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera (Jovan Febriantoko, 2017), menemukan bahwa Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian disimpulkan bahwa total PAD Provinsi di pulau Sumatera sebesar 18,025 Triliun. Derajat desentralisasi fiskal tertinggi pada Provinsi Sumatera utara dan terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian Anjar Nora, I Wayan Suwendra, Fridayanan Yudiatmaja berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Trend pada Pemerintah Kabupaten Buleleng (Anjar Nora, dkk, 2018), mereka mengemukakan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng masuk kategor rendah sekali. Rata-rata kemampuan keuangan daerah dikategorikan rendah dengan pola instruktif. Namun Trend yang berhasil cenderung naik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti dalam penelitian ini menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan teori Analisis Rasio Keuangan yang dikemukakan oleh Mahmudi pada tahun 2019 yang kemudian hasil yang ingin dicapai adalah untuk melihat tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang ada. Untuk teori Pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan teori dari Ani Sri Rahayu yang dikemukakan pada tahun 2018, yang mengutip tiga (3) tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan ekonomi. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan tinjauan bagi penelitian di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam hal meningkatkan kemampuan keuangan daerah demi tercapainya pelaksanaan otonomi daerah.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 13) penelitian dengan metodologi penelitian kualitatif, maka lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan berbagai tanggapan para ahli di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif atau dikenal dengan istilah asing yakni *descriptive research* merupakan salah satu dari beberapa jenis desain penelitian yang mampu memberikan gambaran maupun uraian dengan detail dan sejelas-jelasnya tanpa ada perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penulis bisa membahas dan mengolah data statistik yang memuat informasi tentang objek yang diteliti. Jadi data statistik bisa digunakan dan diolah dalam penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian dan lebih tepatnya memperkaya informasi yang ingin disampaikan maupun mempertajam analisis kualitatif itu sendiri.

Pada sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh berdasarkan observasi penulis dan penelitian kepustakaan. Dapat dikatakan data sekunder bisa berasal dari dokumen grafik formulir, catatan, SMS, foto dan lain-lain. Informan atau orang yang memberikan informasi dibutuhkan dalam memperoleh berbagai keterangan melalui wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. dalam penelitian ini penulis sendiri menjadi instrumen penulisan guna menemukan data-data secara langsung di lapangan. Dilakukan dengan terjun secara langsung kepada lokasi penelitian yakni tempat penelitian berlangsung. Selain itu dalam penelitian ini secara umum, terdapat 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan analisa terhadap wawancara yang dilakukan pada beberapa pegawai yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo turut didukung oleh pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dengan analisis rasio keuangan yang memiliki 4 (empat) indikator yakni Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD.

4 (empat) indikator tersebut dapat menunjukkan kesesuaian antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Wajo. Berikut hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo menggunakan 4 (empat) indikator analisis rasio keuangan.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD yang berguna untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini diitung dengan adanya perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Melihat rumus yang ada di atas, maka derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kabupaten Wajo. Berikut perhitungan dan grafik rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Wajo:

$$2016 = \frac{111.894.035}{1.481.360.598} \times 100\% = 7,5\%$$

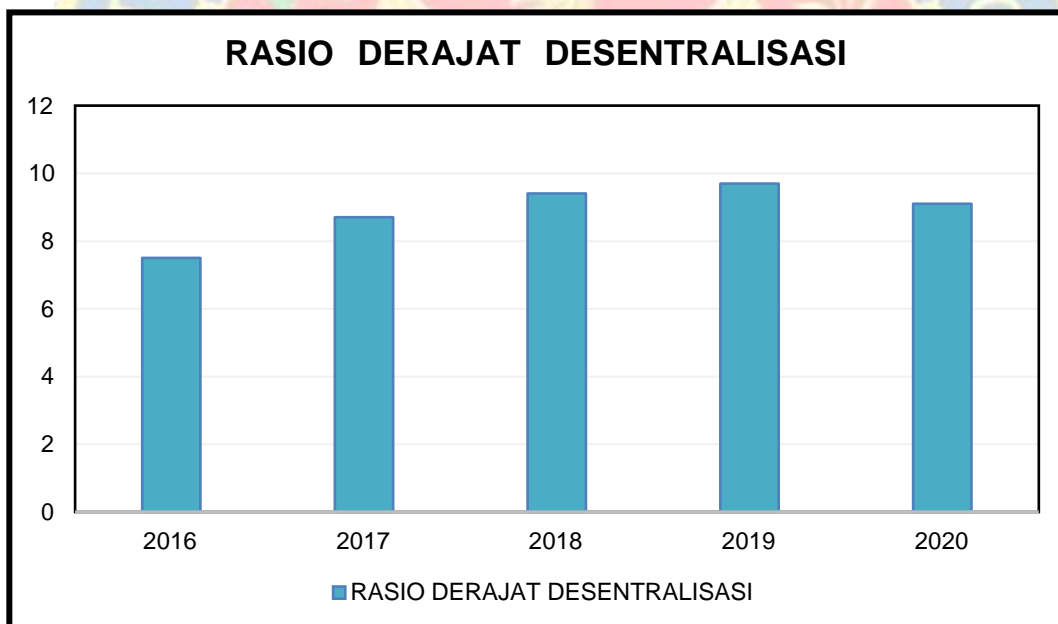
$$2017 = \frac{128.072.281}{1.462.729.340} \times 100\% = 8,7\%$$

$$2018 = \frac{138.610.353}{1.472.901.264} \times 100\% = 9,4\%$$

$$2019 = \frac{155.454.670}{1.599.118.927} \times 100\% = 9,7\%$$

$$2020 = \frac{144.509.478}{1.574.565.784} \times 100\% = 9,1\%$$

Grafik 4. 1
Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Wajo
Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah dari LRA APBD Kabupaten Wajo tahun 2016-2020

Grafik 4.4 tersebut menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Wajo di tahun 2016 mengalami peningkatan dari 7,5% menjadi 8,7% di tahun 2017. Pada tahun 2018 juga kembali mengalami kenaikan menjadi 9,4% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,7%. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 9,1%. Sehingga besar persentase derajat desentralisasi Kabupaten Wajo selama 5 tahun anggaran berada

pada persentase 8%. Jika diukur dengan skala interval yang dapat dilihat pada 2.2 maka berada pada skala 0,00 – 10,00 dan diartikan bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Wajo berada pada skala interval yang sangat kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kontribusi PAD yang tidak stabil dimana terjadi penurunan persentase realisasi PAD Kabupaten Wajo. Sehingga bisa disebutkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Wajo masih sangat kurang dalam meningkatkan penerimaan PAD guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan dalam rasio Ketergantungan Keuangan Daerah digunakan demi mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer. Rasio ini memperlihatkan seberapa tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi. Rumus yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Melihat rumus di atas, maka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya rasio, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan begitu pula sebaliknya. Perhitungan dan grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut:

$$2016 = \frac{1.078.839.765}{1.481.360.598} \times 100\% = 72\%$$

$$2017 = \frac{1.157.562.043}{1.462.729.340} \times 100\% = 79\%$$

$$2018 = \frac{1.096.482.850}{1.472.901.264} \times 100\% = 74\%$$

$$2019 = \frac{1.146.228.487}{1.599.118.927} \times 100\% = 71\%$$

$$2020 = \frac{1.149.306.729}{1.574.565.784} \times 100\% = 72\%$$

Grafik 4. 2
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Wajo tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah dari LRA APBD Kabupaten Wajo tahun 2016-2020

Grafik 4.5 menunjukkan tingginya tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Wajo dengan persentase di atas 70%. Jika diukur dengan skala interval seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3 maka berada pada skala >50,00. Sehingga diartikan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Wajo berada pada skala interval yang begitu tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih tingginya kontribusi dari pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah Kabupaten Wajo dan secara otomatis juga menunjukkan bahwa masih rendahnya sumbangsih PAD Kabupaten Wajo terhadap total pendapatan daerah.


c. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Rasio dihitung dengan membandingkan PAD dengan pendapatan lain yang berasal dari sumber lain, yakni batuan

pemerintah pusat dan provinsi maupun hibah. Rumus yang dipakai guna mengetahui kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

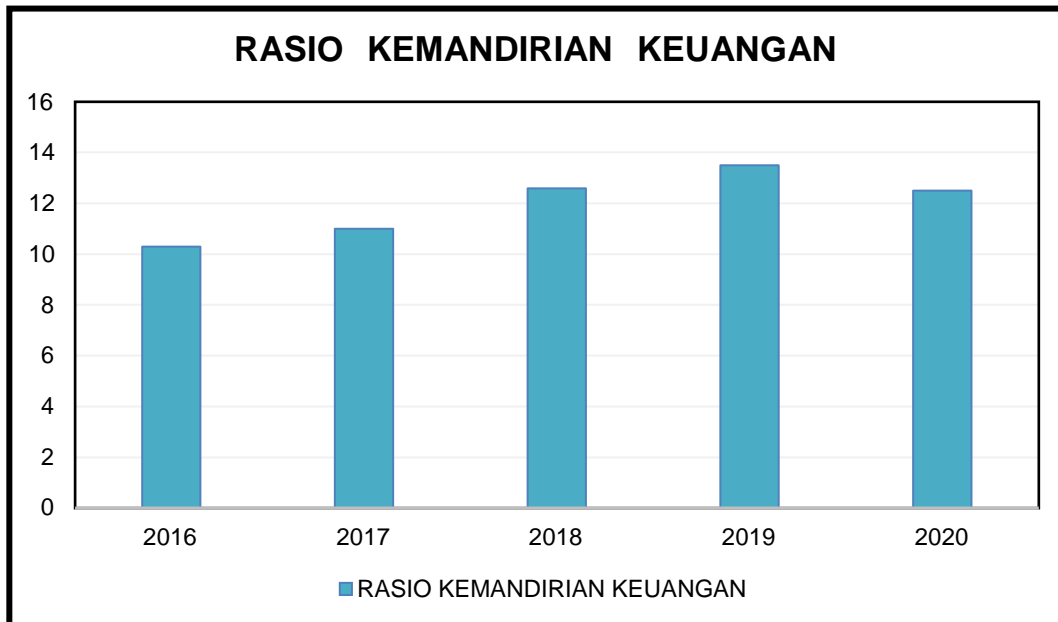
$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100$$

Melihat rumus di atas maka Rasio kemandirian Keuangan dapat menunjukkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Perhitungan dan grafik Rasio Kemandirian Keuangan kabupaten Wajo tahun anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut:



2016 =	$\frac{111.894.035}{1.078.839.765}$	x 100% = 10,3%
2017 =	$\frac{128.072.281}{1.157.562.043}$	x 100% = 11%
2018 =	$\frac{138.610.353}{1.096.482.850}$	x 100% = 12,6%
2019 =	$\frac{155.454.670}{1.146.228.487}$	x 100% = 13,5%
2020 =	$\frac{144.509.478}{1.149.306.729}$	x 100% = 12,5%

Grafik 4. 3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah dari LRA APBD Kabupaten Wajo tahun 2016-2020

Grafik 4.6 yang ada menunjukkan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wajo yang tertinggi ada pada tahun 2019 dengan jumlah 13,5% dan persentase paling rendah pada tahun 2016 yakni 10,3%. Sementara pada tahun 2017 berada di angka 11%, dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 12,6%. Hingga pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan berada di angka persentase 12,5%. Hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wajo berada pada rata-rata 11,9%, jika diukur dengan skala interval seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.4 maka berada pada skala 0-25 dan diartikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wajo berada pada skala interval rendah sekali sehingga menunjukkan adanya pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat dominan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat kontribusi PAD masih begitu minim sehingga kemandirian daerah masih sangat rendah.

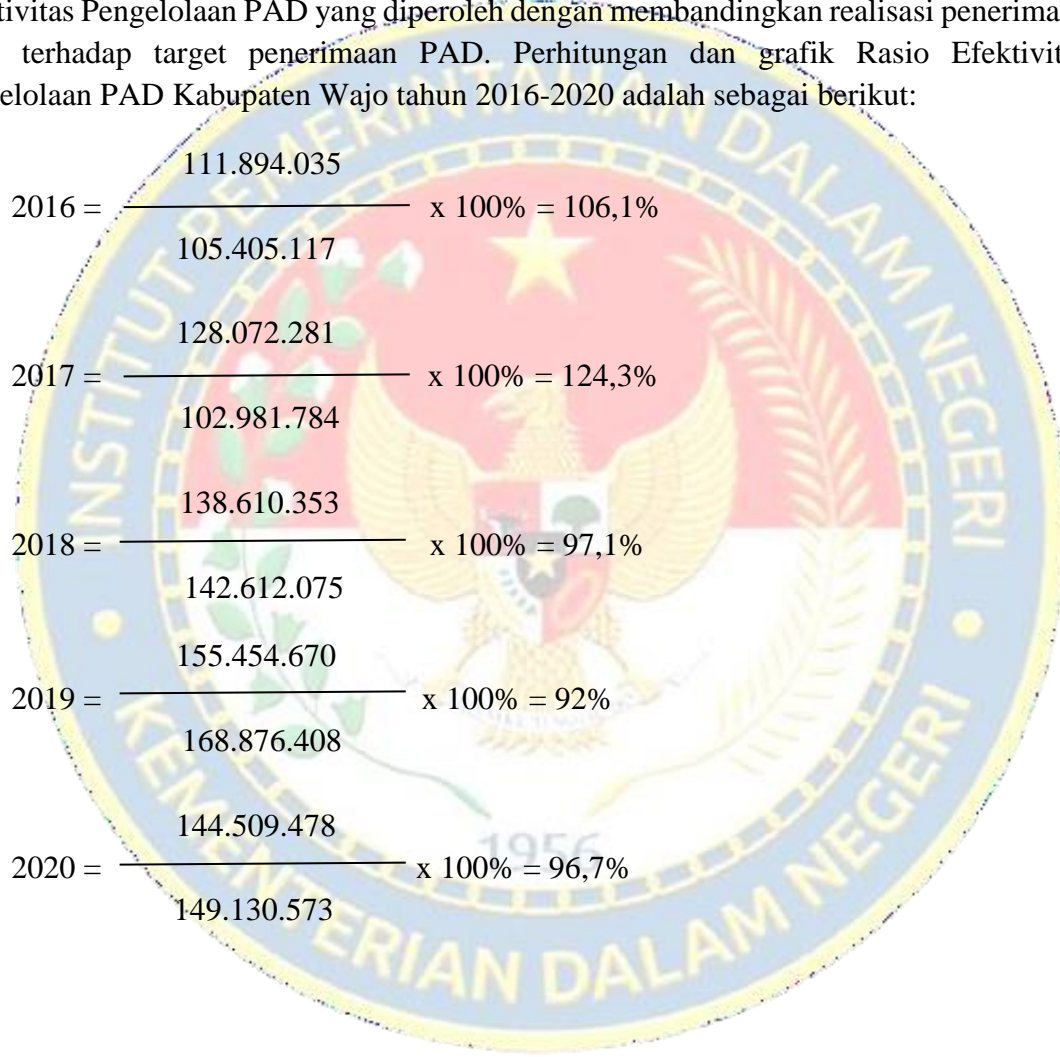
d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pengelolaan pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola

keuangan yang semakin efektif. Rumus yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitasnya adalah sebagai berikut:

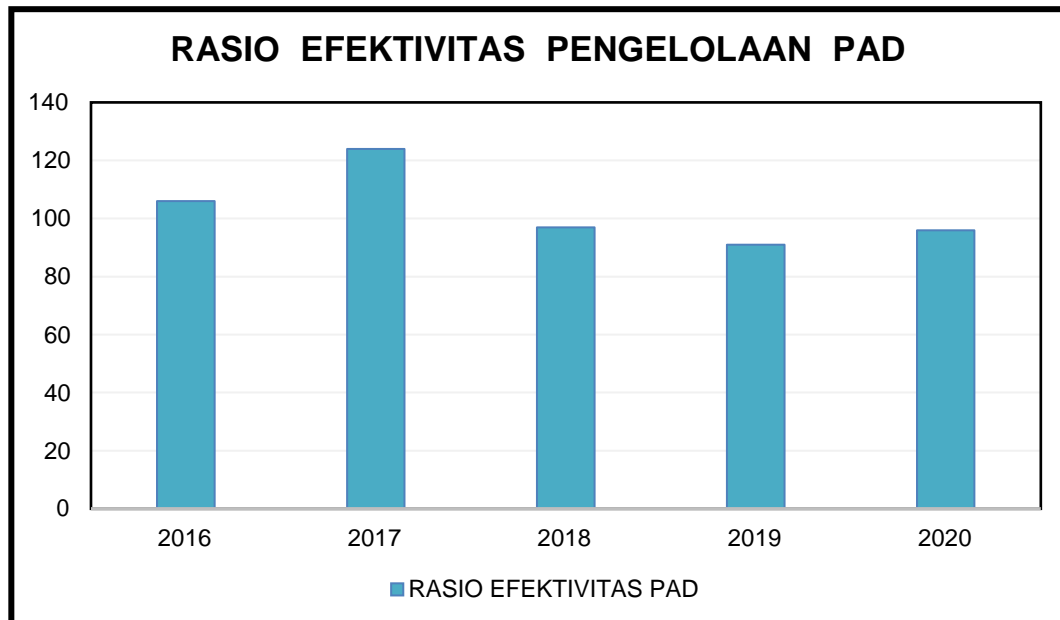
$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Rumus Efektivitas Pengelolaan PAD di atas dipakai untuk menghitung Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. Perhitungan dan grafik Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Wajo tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



2016 =	$\frac{111.894.035}{105.405.117}$	x 100% = 106,1%
2017 =	$\frac{128.072.281}{102.981.784}$	x 100% = 124,3%
2018 =	$\frac{138.610.353}{142.612.075}$	x 100% = 97,1%
2019 =	$\frac{155.454.670}{168.876.408}$	x 100% = 92%
2020 =	$\frac{144.509.478}{149.130.573}$	x 100% = 96,7%

Grafik 4. 4
Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD
Kabupaten Wajo Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah dari LRA APBD Kabupaten Wajo tahun 2016-2020

Grafik 4.7 di atas menunjukkan bahwa persentase efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Wajo berada pada angka 103,3%. Jika dilihat dari skala interval diartikan bahwa Kabupaten Wajo dikategorikan sangat efektif dalam pengelolaan PAD. Walaupun masih mengalami penurunan tahun anggaran 2018 dan 2019. Namun pada tahun 2017 cukup mengalami kenaikan yang signifikan hingga 124,3%. Hal ini sesuai hasil penulisan yang ada berdasarkan uraian Subbidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Wajo yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya potensi daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan oleh sumber daya yang ada.

Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Ani Sri Rahayu (2018: 22) dengan 3 (tiga) indikator yaitu Tujuan Politik, Tujuan Administratif, Tujuan Ekonomi yang akan menyajikan data pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Wajo sebagai berikut:

e. Tujuan Ekonomi

Salah satu indikator dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2016-2020 adalah pelaksanaan demokratisasi politik sebagai perwujudan dari Tujuan Politik. Sejak awal terbentuk, Pemerintahan Kabupaten Wajo dulunya adalah berbentuk kerajaan dinasti yang dipimpin oleh seorang Raja yang dikenal dengan sebutan “*Arung Matoa*”, dengan menganut beberapa tatanan budaya politik yang ada di Kabupaten

Wajo. Pada tahun 2019 pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia disajikan data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Wajo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

No.	Pemilu	Tingkat Partisipasi	Tingkat Golput
1.	2009	70,7%	29,3%
2.	2014	71,7%	28,3%
3.	2019	75, 2%	24,8%

Sumber: Diolah oleh penulis dari www.kab-wajo.kpu.go.id

Tujuan politik dalam indikatornya demokratisasi politik di Kabupaten Wajo secara sederhana dapat dikatakan berjalan dengan baik. Jika dilihat dari tabel 4.4 yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu sudah berada diangka 70% dan angka golput yang berada diatas 20%, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Wajo untuk berperan aktif dalam pelaksanaan politik sudah ada akan tetapi angka partisipasi tersebut bisa ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan beberapa upaya-upaya terkait.

f. Tujuan Administratif

Perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah. Pembahasan tentang sumber daya keuangan pada indikator tujuan administratif sejalan dengan analisis data keuangan daerah Kabupaten Wajo yang telah disajikan sebelumnya dalam hasil analisis 4 (empat) rasio. Sumber daya keuangan menjadi bagian dari perwujudan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, karena sumber daya keuangan daerah bisa saja bersumber dari dana perimbangan yang sumbernya dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya keuangan apabila dikaitkan dengan keuangan daerah yakni efektivitas dari sumber pendapatan asli daerah dalam meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo sejalan dengan hasil analisis Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD yang tersaji pada grafik 4.7. Dijelaskan bahwa jika dilihat dari skala interval dengan rata-rata 103,3% berarti skala efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Wajo berada pada level yang sangat efektif.

g. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo. Menurut pandangan *The United Nations Development Programme (UNDP)* merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan.

Tabel 4. 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Wajo
Tahun 2016-2020

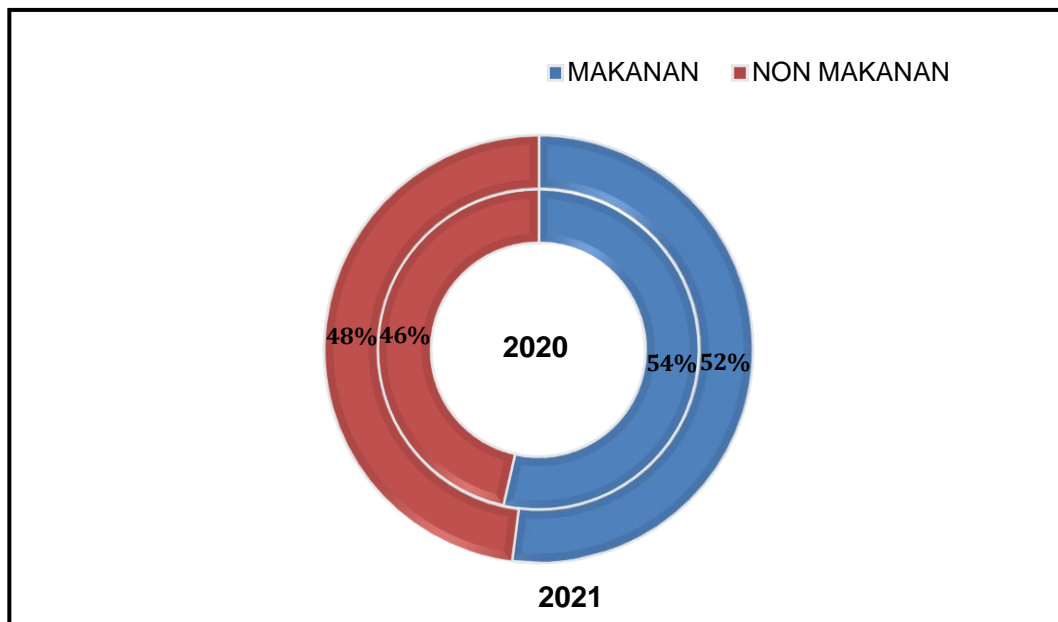
No.	Tahun	IPM Kabupaten Wajo
1.	2016	79,60%
2.	2017	79,97%
3.	2018	80,66%
4.	2019	81,25%
5.	2020	82,33%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 yang ada diatas, dapat dilihat bahwa disetiap tahunnya IPM Kabupaten Wajo mengalami kenaikan. IPM terendah berada di angka 79,60% pada tahun 2016, dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 berada di persentase angka 82,33%, menandakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo sudah cukup baik.

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia jika ditinjau dari aspek ekonomi maka yang menjadi tolak ukur yang dapat dijadikan perbandingan adalah indikator daya beli untuk mengukur standar hidup. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran.

Grafik 4. 5
Persentase Pengeluaran Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di
Kabupaten Wajo, 2020-2021 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo tahun 2021

Total pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1.019.046. Jika rata-rata setiap rumah tangga di Kabupaten Wajo memiliki empat anggota rumah tangga, maka pada tahun 2021 ini setiap rumah tangga rata-rata memiliki pengeluaran sejumlah Rp 4.076.184 per bulan. Secara umum, pola pengeluaran penduduk hampir seimbang antara pengeluaran makanan dan non makanan. Dimana persentasenya hampir mendekati 50:50.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo masih dalam kategori keuangan daerahnya rendah dalam hal ini dalam analisis rasio yang telah disajikan menunjukkan persentase nilai dari tiga (3) analisis rasio dari empat (4) menyatakan bahwa Kabupaten Wajo masih rendah. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memerlukan banyak masukan dalam pengembangan dan peningkatan sumber-sumber potensial Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Sama halnya dengan penelitian Gebriany yang menyatakan bahwa PAD Kota Bitung lebih kecil dibanding belanja daerahnya. Sehingga perlu peningkatan PAD dengan upaya intensifikasi, karena kontribusi Pajak/Retribusi daerah dominan dalam PAD nya (Gebriany Wenur, 2013). Kabupaten Wajo juga dalam struktur PAD nya, pajak/retribusi daerah yang dominan dalam

struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo. Terkait dengan PAD maka desentralisasi fiskal Kabupaten Wajo menunjukkan skala yang masih sangat rendah, dikarenakan belum efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wajo. Sedangkan dalam penelitian Jovan Febriantoko menemukan bahwa berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian disimpulkan bahwa total PAD Provinsi di pulau Sumatera sebesar 18,025 Triliun. Derajat desentralisasi fiskal tertinggi pada Provinsi Sumatera utara dan terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Jovan Febriantoko, 2017). Pada penelitian ini, yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wajo yang masih sangat rendah sama halnya dengan temuan penelitian dari Anjar Nora dkk, yang mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng masuk kategori rendah sekali. Rata-rata kemampuan keuangan daerah dikategorikan rendah dengan pola instruktif. Namun Trend yang berhasil cenderung naik (Anjar Nora, dkk, 2018). Akan tetapi pada penelitian Anjar Nora dkk, mereka menemukan bahwa pola trend cenderung naik, dimana trend keuangan yang ada disana termasuk dalam penggunaan sistem pengelolaan keuangan meningkat, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Wajo. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Wajo sendiri berjalan dengan baik ditinjau dari ketiga aspek tujuan yang hendak dicapai, baik itu dalam tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan ekonomi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wajo masuk kategori rendah. Pertama, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum Optimal. Kedua, Potensi Daerah Kabupaten Wajo belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu tingginya angka ketergantungan pemerintah Kabupaten Wajo terhadap dana transfer dari pusat.

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir tulisan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Wajo, sebagai berikut:

- Kemampuan keuangan daerah diukur berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan Kabupaten Wajo tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

- ❖ Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata 8%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- ❖ Rasio Kemandirian Keuangan rata-rata 11,9%, menunjukkan bahwa kemandirian keuangan yang masih sangat rendah bahkan terjadi pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat begitu mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
- ❖ Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah rata-rata di atas 70%, menunjukkan sangat tingginya ketergantungan daerah atas pendapatan dari dana transfer umum dan bantuan keuangan provinsi.
- ❖ Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Wajo berada pada angka 103,3%, menunjukkan bahwa Pemerintah daerah termasuk dalam kategori sangat efektif dalam mengelola PAD.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi dan Ani Sri Rahayu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Cresswell. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusriyah, Sri. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif*

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semarang: UNISSULA PRESS.

Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Braja Grafindo Persada.

Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.

- Primanto, Aji. 2020. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Intelegensia Media.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- . 2019. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Wasistiono, sadu dan F. Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.



